



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat: Jl. Imam Bonjol No 44 Pariaman, Desa Cimparuah, Kecamatan Pariaman
Tengah Kota Pariaman, 25511

Website: //diskominfo.pariamankota.go.id E-mail: diskominfo@pariamankota.go.id

Tanggal	13 Februari 2025	Media	Haluan
Kategori	PELAYANAN UMUM	Jurnalis	h/mta

Harian Umum Independen

HALUAN

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

KLIPING KORAN

HARI : Kamis
TANGGAL : 13 Februari 2025

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DPMPTSP Pariaman Catat Ketepatan Waktu Layanan

98,37 Persen

PARIAMAN, HALUAN - Selama tahun 2024, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pariaman melayani 6.431 permohonan perizinan dan non perizinan masyarakat dengan persentase ketepatan waktu layanan mencapai 98,37 persen.

"Selama setahun penyelenggaraan pelayanan, kita sudah melampaui target ketepatan waktu layanan, yang mana kalau sesuai standarnya kita targetkan 82 persen," kata Kepala DPMPTSP Kota Pariaman, Gusniyeti Zaunit, Rabu (12/2).

Ia menjelaskan, saat ini masyarakat dapat mengajukan permohonan perizinan dan non perizinan dengan lebih mudah melalui sistem Online Single Submission Risk- Based Ap-

proach (OSS-RBA). Jadi, masyarakat yang ingin mengurus izin bisa melakukannya dari rumah tanpa perlu datang ke mal pelayanan publik (MPP).

"Perizinan bisa dari rumah melalui aplikasi OSS, suratnya bisa print sendiri tanpa perlu ke kantor. Dokumen syarat yang perlu disiapkan pun tidak banyak, hanya berupa KTP dan NPWP bagi perorangan," kata dia.

Dikatakannya, persyaratan tersebut juga berlaku bagi badan usaha. Perusahaan hanya perlu menyiapkan dokumen tambahan seperti akta notaris dan persyaratan teknis lainnya sesuai jenis usaha untuk mengurus izin.

"Kalau atas nama perusahaan, maka ditambah akta notaris, lalu persyaratan teknis

sesuai jenis usaha. Perizinan yang sudah diterbitkan juga tidak ada batas waktu kadaluarsa sepanjang usaha masih berjalan, jadi tidak perlu mengurus perpanjangan izin," jelasnya.

Gusniyeti menuturkan, pihaknya melayani lebih dari 200 jenis usaha baik itu di bidang Kesehatan, Pariwisata, Peternakan dan Pertanian serta bidang lainnya. "Izin usaha ini ada dari instansi vertikal, pemda seperti PU, Perindag, atau bidang kesehatan, pariwisata, peternakan pertanian, jumlahnya ada dua ratus lebih," ulasnya.

Ia menyebut, izin usaha sangat diperlukan untuk legalitas sebuah usaha. Selain itu, pelaku usaha yang sudah berizin juga dapat menikmati manfaat lain seperti program pelatihan dan pembinaan dari pemerintah

Kota Pariaman.

"Maka dari itu, diimbau kepada masyarakat untuk mengurus izin usaha karena gratis

dan mudah. Gunanya untuk legalitas usaha, sehingga ada kepastian hukum bagi usahanya, mempermudah akses di

perbankan, serta berpeluang mendapat pembinaan dari pemerintah," tutur Gusniyeti. (h/mta)



Gusniyeti Zaunit,



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat: Jl. Imam Bonjol No 44 Pariaman, Desa Cimparuah, Kecamatan Pariaman
Tengah Kota Pariaman, 25511

Website: //diskominfo.pariamankota.go.id E-mail: diskominfo@pariamankota.go.id

Tanggal	13 Februari 2025	Media	Haluan
Kategori	PENDIDIKAN	Jurnalis	h/mta

Harian Umum Independen

HALUAN

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

KLIPING KORAN

HARI : Kamis

TANGGAL : 13 Februari 2025

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KEPADA PEMPROV SUMBAR

Pariaman Salurkan Bantuan Keuangan Khusus Rp1,6 Miliar

PARIAMAN, HALUAN — Pemko Pariaman menyalurkan Bantuan Keuangan Khusus atau BKK bagi SMA, SMK dan SLB negeri dalam program wajib belajar 12 tahun kepada pemerintah provinsi Sumatera Barat sebanyak Rp1.679.657.225.

“Nominal tersebut diperuntukkan sebagai sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) semester genap tahun 2025 dengan rincian Rp60.000 per siswa per bulan,” kata Plt Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga (Disdikpora) Kota Pariaman, Riky Falantino kepada *Haluan*, Rabu (12/2).

Ia menyebut, perjanjian kerja sama pemberian BKK ini sudah berlangsung sejak kewenangan SMA/SMK sederajat beralih ke pemerintah provinsi pada 1 Januari 2017 melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Untuk melancarkan program Pemko Pariaman yaitu pendidikan wajib belajar 12 tahun, maka diadakanlah perjanjian kerja sama dengan pemko memberikan BKK ke pemprov, sehingga siswa SMA/SMK sederajat di Kota Pariaman tidak dipungut biaya SPP,” kata Riky.

Sementara itu, untuk tingkat SD dan SMP kewenangannya masih di bawah pemerintah kota. Oleh sebab itu, biaya

pendidikan siswa-siswanya ditanggung langsung oleh Pemko Pariaman.

Besaran BKK ke pemprov ini, kata Riky bergantung pada jumlah murid setiap tahunnya. Adapun satu semester di tahun 2024 ini terjadi peningkatan besaran BKK karena adanya penambahan jumlah siswa.

“Pada APBD tahun 2024 kita mengeluarkan BKK Rp3.235.680.000 untuk 12 bulan. Sementara dalam APBD Tahun 2025 untuk enam bulan ke depan sebanyak Rp1.679.657.225. Ada sedikit kenaikan karena tergantung jumlah murid,” jelasnya.

Ia menerangkan, terdapat 12 sekolah menengah atas atau sederajat yang ada di Kota Pariaman. Sekolah tersebut terdiri dari enam SMA negeri, empat SMK negeri dan dua SLB negeri.



RIKY FALANTINO

Pada kesempatan yang sama, Riky mengatakan adanya pendidikan wajib belajar 12 tahun ini bertujuan memberi pendidikan layak kepada anak bangsa yang akan menjadi generasi penerus.

Melalui gratis biaya SPP untuk tingkat SMA/SMK dan sederajat ini diharapkan rata-rata lama pendidikan di Kota Pariaman juga semakin meningkat. (h/mta)

